



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIRUDDIN
2. Jabatan : WAKIL DEKAN SUMBER DAYA DAN KEUANGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
3. NHK : 663934

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.230.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 361 m2/300 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 708 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Bangunan Seluas 125 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Bangunan Seluas 100 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA LHOKSEUMAWE , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 524.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA H-RV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 223.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.977.000.000

III. HUTANG

Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.777.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.